



JURNAL ISIP VOICE

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Available online at <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/fisipvoice>

Vol. 3 No. 2, July-Desember2024, pages: 11-18

ISSN: 2963-1874

<http://dx.doi.org/10.58222/jiv.v3i2.1021>

The Transformation of E-Government Through the Regional Government Information System (SIPD) at the Regional Human Resource Development Agency of South Sumatra Province

Transformasi E-Government Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan



Farhan Fasha Syuhada^a

Christofer Julian^b

Atrika Iriani^c

Annisa Larasati Chairani^d

Trecy Austin^e

Article history:

Submitted: 20-11-2024

Revised: 03-12-2024

Accepted: 13-12-2024

Keywords:

E-Government Transformation, SIPD Implementation, Regional Financial Management

Abstract

This study discusses the transformation of e-Government through the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at the Regional Human Resource Development Agency (BPSDMD) of South Sumatra Province. The purpose of this research is to analyze how SIPD implementation improves efficiency, transparency, and accountability in regional financial management, as well as to identify the challenges faced during its implementation. The method used is a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and document analysis. The results show that SIPD enhances efficiency in planning and budgeting processes, and improves data integration. However, challenges such as technological infrastructure limitations and human resource readiness remain obstacles. The conclusion of this study is that SIPD implementation at BPSDMD South Sumatra contributes to better governance, but requires improvements in human resource competencies and technology infrastructure reinforcement.

Key word: *E-Government Transformation, SIPD Implementation, Regional Financial Management.*

^a Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

^b Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

^c Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

^d Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

^e Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas transformasi e-Government melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan SIPD meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama implementasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD mampu meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta integrasi data yang lebih baik. Namun, terdapat hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan SIPD di BPSDMD Sumsel berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan, tetapi membutuhkan peningkatan kompetensi SDM dan penguatan infrastruktur teknologi.

Kata kunci: *Transformasi E-Government, Implementasi SIPD, Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Journal of Social Science and Humanities ©2022.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Farhan Fasha Syuhada*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email address: farhanfashasyuhada@gmail.com

1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong perubahan besar dalam cara pemerintah di seluruh dunia mengelola layanan publik. Teknologi ini membuka peluang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sebuah konsep yang dikenal sebagai e-government. Istilah e-Government mengacu pada penerapan teknologi digital dalam proses administrasi pemerintahan untuk meningkatkan aksesibilitas, partisipasi, dan efisiensi pelayanan kepada publik (Triyanto et al., 2021). Di Indonesia, pemerintah telah mengadopsi e-Government sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan terintegrasi, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Transformasi e-Government di tingkat daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, menjadi semakin penting di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Salah satu inisiatif pemerintah untuk mendigitalisasi tata kelola keuangan adalah melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD merupakan sistem yang dirancang untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah secara terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan cara mempercepat proses perencanaan, memperbaiki integrasi data, dan meminimalkan risiko terjadinya kesalahan dalam proses pelaporan anggaran. Menurut (Triyanto et al., 2021), keberhasilan e-Government sangat bergantung pada sejauh mana sistem mampu menciptakan efisiensi administrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui transparansi yang lebih baik.

Di Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) telah memulai langkah-langkah strategis untuk menerapkan SIPD sebagai bagian dari transformasi e-government. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur negara melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, BPSDMD

bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna mendukung tata kelola keuangan yang lebih efisien dan transparan. Hal ini tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, tetapi juga dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin menuntut akses cepat dan transparan terhadap informasi publik. Transformasi ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat masih adanya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang sering kali terhambat oleh birokrasi yang kompleks, kurangnya transparansi, dan inefisiensi dalam proses penganggaran serta pelaporan. Menurut (Fefkhiatin et al., 2015), salah satu tantangan terbesar dalam implementasi e-Government adalah bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa teknologi informasi yang diterapkan tidak hanya mengotomatisasi proses yang ada, tetapi juga mengubah budaya organisasi dan tata kelola pemerintahan secara fundamental.

Implementasi SIPD di BPSDMD Sumatera Selatan diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dengan memperkenalkan mekanisme yang lebih transparan dan terintegrasi. Sistem ini memungkinkan setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dapat diakses dan dimonitor secara real-time oleh pemangku kepentingan, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan penyimpangan. Dalam konteks transformasi ini, kesiapan sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting. Berdasarkan teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh (Anatan & Ellitan, 2009), adopsi teknologi baru dalam suatu organisasi, terutama di sektor publik, tidak hanya tergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada kesiapan mental dan kemampuan individu-individu yang terlibat dalam proses tersebut. Adopsi SIPD di BPSDMD Sumatera Selatan menuntut peningkatan kompetensi aparatur dalam menggunakan teknologi informasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang dihadirkan oleh sistem digital ini. Tanpa kesiapan yang memadai, implementasi teknologi baru seperti SIPD dapat menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang kurang memahami manfaatnya atau merasa terganggu oleh perubahan yang dihadirkan. (Anatan & Ellitan, 2009) menjelaskan bahwa keberhasilan e-Government sangat bergantung pada dukungan dari seluruh elemen pemerintahan, termasuk dukungan dari pimpinan, infrastruktur yang memadai, serta kemauan politik untuk mengatasi tantangan yang muncul selama proses transformasi.

Dalam kasus BPSDMD Sumatera Selatan, tantangan yang dihadapi bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi sumber daya manusia dan regulasi. Meskipun SIPD memiliki potensi besar untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, beberapa kendala yang muncul meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan bagi aparatur dalam mengoperasikan sistem, serta kurangnya koordinasi antardepartemen terkait yang menghambat integrasi data secara penuh. Selain itu, aspek budaya organisasi juga menjadi tantangan dalam implementasi SIPD. Sebagaimana dikemukakan oleh (Wiranti & Frinaldi, 2023), transformasi digital di sektor publik sering kali terhambat oleh resistensi terhadap perubahan, terutama jika pegawai pemerintah merasa nyaman dengan sistem yang sudah ada dan enggan beralih ke teknologi yang lebih baru. Hal ini diperparah oleh kurangnya insentif atau dorongan bagi pegawai untuk mengadopsi sistem baru. Untuk itu, transformasi digital tidak hanya memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih, tetapi juga perubahan dalam pola pikir dan budaya kerja, di mana pegawai didorong untuk terus belajar dan berinovasi dalam memanfaatkan teknologi. Di sisi lain, penerapan SIPD juga sejalan dengan peraturan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan. SIPD diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam memenuhi tuntutan regulasi ini dengan menyediakan data keuangan yang akurat. Sistem ini memungkinkan pelacakan anggaran secara lebih rinci dan memudahkan proses audit serta evaluasi kinerja anggaran, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana publik.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam (Creswell, 2019) bagaimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diimplementasikan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang terjadi di lapangan, terutama terkait dengan aspek transformasi e-Government dan dampaknya terhadap efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

A. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang implementasi SIPD. Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara Mendalam (Aslichati et al., 2014): Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam penerapan SIPD di BPSDMD Sumatera Selatan. Informan utama termasuk Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, staf teknis, serta pihak lain yang bertanggung jawab atas operasional SIPD. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan terkait persepsi dan pengalaman mereka dalam menggunakan SIPD, serta tantangan yang dihadapi selama proses implementasi.
2. Observasi Langsung (Sugiyono dalam (Purnawan, 2021): Observasi dilakukan untuk memantau secara langsung bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah dijalankan dengan menggunakan SIPD. Peneliti mengamati berbagai tahapan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara objektif kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan.
3. Analisis Dokumen (Creswell dalam (Purnawan, 2020)): Peneliti juga menganalisis berbagai dokumen terkait implementasi SIPD, termasuk laporan tahunan, dokumen kebijakan internal, serta data evaluasi yang dihasilkan oleh sistem. Dokumen-dokumen ini membantu memberikan konteks yang lebih luas terkait penerapan SIPD dan kontribusinya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Data sekunder seperti regulasi nasional terkait e-Government (misalnya, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE) juga digunakan untuk memperkuat analisis.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama:

1. Data Primer (Sugiyono dalam (Purnawan, 2014)): Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait di BPSDMD Sumatera Selatan. Informan dipilih secara purposive sampling, yang meliputi individu yang memiliki peran strategis dalam implementasi SIPD, seperti Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan serta staf teknis yang menangani pengelolaan sistem.
2. Data Sekunder (Miles & Huberman, 1992): Data sekunder meliputi dokumen resmi seperti laporan evaluasi, kebijakan internal, regulasi terkait, serta hasil audit yang berhubungan dengan implementasi SIPD. Dokumen ini memberikan data historis dan informasi kontekstual yang mendukung temuan dari data primer.

C. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik analisis ini mengacu pada model yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dalam (Purnawan et al., 2022) yang terdiri dari empat tahapan utama:

1. Pengumpulan Data: Pada tahap ini, semua data yang relevan dari wawancara, observasi, dan dokumen dikumpulkan dan disusun dalam catatan lapangan.
2. Reduksi Data: Data yang terkumpul kemudian direduksi, yakni dipilih dan disederhanakan untuk fokus pada informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Informasi yang kurang relevan atau redundan dieliminasi, sedangkan data penting disusun secara sistematis dalam kategori tertentu.
3. Penyajian Data: Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau tabel untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Penyajian ini memungkinkan peneliti untuk memahami pola, hubungan, serta keterkaitan antar-temuan di lapangan.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari temuan yang telah disajikan dan memverifikasi hasil temuan tersebut. Peneliti membandingkan hasil analisis dengan teori yang digunakan untuk memastikan validitas hasil penelitian dan keakuratan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan memberikan beberapa dampak signifikan yang menggambarkan peningkatan dalam hal efisiensi, transparansi, integrasi data, serta kualitas pelayanan.

A. Efisiensi dalam Perencanaan dan Penganggaran

SIPD berhasil meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran di BPSDMD dengan mengintegrasikan semua tahapan perencanaan dan verifikasi anggaran dalam satu platform terpusat. Sebelum SIPD diterapkan, proses perencanaan dilakukan secara manual dan membutuhkan koordinasi lintas unit kerja yang memakan waktu. Bapak Syaruddin, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, menyoroti bahwa dengan adanya SIPD, proses perencanaan kini lebih cepat dan terstruktur: *“Salah satu keunggulan utama SIPD adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dalam satu platform. Sebelumnya, perencanaan dilakukan secara manual dan memerlukan koordinasi lintas unit kerja yang rumit. Dengan SIPD, semua tahapan perencanaan, mulai dari penyusunan Kinerja Utama, Rencana Strategis, LKJIP, hingga IKU, dilakukan lebih efisien.”* Dengan SIPD, setiap unit kerja dapat langsung memasukkan kebutuhan anggaran yang kemudian diverifikasi oleh tim perencana. Integrasi ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi potensi kesalahan dalam penyusunan APBD, serta mempermudah koordinasi antara unit kerja di BPSDMD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

B. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

SIPD juga memperkuat transparansi dengan memungkinkan akses informasi yang lebih terbuka terkait perencanaan dan pelaporan anggaran. Menurut Bapak Syaruddin, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, sistem ini memainkan peran penting dalam menciptakan kepercayaan publik melalui kemudahan akses yang diberikan kepada pemangku kepentingan: *“SIPD memungkinkan masyarakat dan pihak eksternal, seperti DPRD dan inspektorat, untuk mengakses informasi keuangan secara lebih terbuka, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.”* Laporan keuangan yang terintegrasi di SIPD, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), kini dapat diakses oleh publik dan pihak berwenang dengan lebih mudah, mendukung akuntabilitas BPSDMD dalam pengelolaan anggaran daerah.

C. Integrasi Data dan Informasi untuk Evaluasi Program

SIPD memungkinkan integrasi data lintas unit di BPSDMD, yang mempermudah proses evaluasi kinerja program pelatihan ASN. Dengan SIPD, informasi pelaksanaan program pelatihan dapat dilacak dan dianalisis langsung dalam sistem, yang memberikan pandangan langsung terhadap realisasi dan dampak program. Bapak Syaruddin, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyatakan bahwa integrasi data ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas evaluasi: *“Integrasi data yang ditawarkan SIPD memudahkan proses evaluasi program pelatihan di BPSDMD. Semua data terkait pelaksanaan, realisasi anggaran, dan capaian program dapat diakses dalam satu sistem, yang sangat membantu dalam evaluasi kinerja. Ini mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan real-time.”*

D. Penerapan Model E-Government (G2G)

BPSDMD menggunakan model Government-to-Government (G2G) dalam implementasi SIPD untuk mendukung koordinasi antar instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Model ini sesuai dengan kebutuhan pertukaran data yang efisien antara BPSDMD dan pemerintah pusat. Bapak Syaruddin, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menjelaskan bahwa model ini memungkinkan BPSDMD untuk memastikan akses cepat bagi berbagai instansi terkait, sehingga mendukung kerja sama yang lebih baik: *“Model yang diterapkan lebih banyak mengarah pada Government to Government (G2G), karena interaksi antar lembaga pemerintahan sangat penting dalam proses perencanaan dan pelaporan. Dengan G2G, kami bisa memastikan bahwa informasi keuangan dan laporan yang diperlukan dapat diakses cepat oleh semua instansi terkait.”*

E. Indikator Kualitas Pelayanan melalui SIPD

SIPD memenuhi berbagai indikator kualitas, yaitu efisiensi, kepercayaan, reliabilitas, dan dukungan kepada masyarakat. BPSDMD menekankan bahwa SIPD memudahkan proses perencanaan dan pelaporan yang cepat dan akurat, mendukung keterbukaan informasi, dan meningkatkan responsivitas layanan: *“SIPD berhasil memenuhi indikator kualitas seperti efisiensi, transparansi, reliabilitas, dan dukungan kepada masyarakat. Kami telah melihat peningkatan kepercayaan dari masyarakat dan kemudahan dalam pelaporan, sehingga memperkuat akuntabilitas kami sebagai instansi pemerintah.”*

F. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi SIPD

Faktor pendukung utama penerapan SIPD adalah adanya fasilitas teknologi yang memadai, termasuk komputer dengan spesifikasi tinggi dan akses internet stabil. Namun, terdapat kendala terkait ketidakstabilan jaringan yang masih menghambat proses pengolahan data. Bapak Syaruddin menguraikan peran teknologi yang ada dan kendala yang sering dihadapi: *“Faktor pendukung utama adalah tersedianya fasilitas teknologi yang memadai. Namun, masalah jaringan sering kami hadapi, terutama saat kecepatan atau stabilitas jaringan tidak sesuai harapan, yang dapat menghambat respons terhadap masyarakat.”* Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan berhasil mendukung konsep E-Government, terutama dalam hal efisiensi, transparansi, dan koordinasi antar instansi.

4. Kesimpulan Dan Saran

Penelitian mengenai transformasi E- Government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa penerapan SIPD secara signifikan telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses administrasi dan pengelolaan anggaran di instansi tersebut. Mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan SIPD di BPSDMD memungkinkan perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan anggaran dilakukan secara lebih terintegrasi dan cepat dibandingkan metode manual yang digunakan sebelumnya. Sistem ini mendukung pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat, sehingga mempermudah akses publik terhadap laporan keuangan dan memfasilitasi pelaporan terbuka sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah, sementara integrasi data dalam SIPD memungkinkan pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terhadap anggaran dan kinerja program di BPSDMD. Namun, implementasi SIPD di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk resistensi perubahan di kalangan pegawai, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia yang belum optimal dalam penguasaan keterampilan teknis. Hambatan-hambatan ini mengindikasikan pentingnya pelatihan teknis berkelanjutan bagi ASN serta peningkatan infrastruktur digital untuk mendukung kelancaran dan efektivitas sistem.

5. Daftar Pustaka

- Anatan, L., & Ellitan, L. (2009). *Manajemen Inovasi Transformasi: Menuju Organisasi Kelas Dunia*. Alfabeta.
- Aslichati, L., Prasetyo, H. I. B., & Irawan, P. (2014). *Metode Penelitian Sosial* (1st ed.). Universitas Terbuka.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Fefkhiatin, A., Purqoko, & Astrika, L. (2015). Evaluasi Implementasi Program Electronic Kartu Tanda Penduduk (E-Ktp) Di Kabupaten Tegal Dalam Mewujudkan Electronic Government (E-Gov). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 330–360.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Purnawan, H. (2014). TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial). *Publika*, 2(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8372>
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages, Lahat Regency, Indonesia*. 06(1), 1–9.
- Purnawan, H., Noviyanto, H., & Tauran. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN LAHAT. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 229–237.
- Triyanto, D., Purnawan, H., Saputra, B., Padang, U. N., Governance, G., Publik, P., Bengkulu, K., Governance, G., Service, P., & City, B. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu Application of Good Governance Principles in Public Services At the Betungan Community Health Center, Bengkulu City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*.
- Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik dengan Teknologi di Era Digital. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 748–754.

